

**Dokumentasi Wawancara dengan Ibu FARIANA, S.IP., M.IP.
selaku Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, Dan Evaluasi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah)**



**Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Rabu, 28 Mei 2014)**

HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)

Fokus pada Implementor (BKD)

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung?

Jawab : Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008, KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian. Pelayanan Kepegawaian tersebut antara lain : Asuransi kesehatan, Pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan serta untuk menggantikan Kartu Pegawai (karpeg) sebagai Kartu Identitas Pegawai (ID).

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : Iya tentu saja kami BKD selaku *leading sector* dalam implementasi KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE. Dalam hal ini saya selaku Kasubag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi langsung ke BKN untuk melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tahapan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Kota Bandar Lampung.

3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan?

Jawab : Iya tentu, PNS yang akan melakukan pengambilan data KPE diharuskan mengikuti prosedur atau persyaratan semisal fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP tersebut.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Masih banyaknya PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE sejumlah \pm 1500 PNS, disamping itu BKN belum memberikan jadwal untuk pemfotoan ulang bagi PNS kota Bandar Lampung, terlepas dari itu semua KPE Kota Bandar Lampung belum menunjuk pihak ke-3 dalam hal layanan perbankan/pembayaran gaji PNS.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Secara teknis, banyak upaya sosialisasi yang telah kami lakukan terkait implementasi KPE antara lain : mengundang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Gedung Sumergou dalam acara Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian terkait Konversi Kartu Pegawai (KARPEG) ke Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan BKN di Jakarta. BKN berperan memberikan arahan-arahan pada hal apa saja yang harus dilakukan BKD kota terkait implementasi KPE. BKN juga berperan aktif dengan melakukan kunjungan ke Kota Bandar Lampung.

7. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Ya, setelah saya langsung berkoordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta. Pihak BKN menyerahkan sepenuhnya otoritas penunjukan pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, hal ini karena pihak BKN tidak ada dasar untuk memaksakan Layanan Perbankan harus dilakukan oleh bank tertentu.

8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Berdasarkan Catatan saya, KPE pertama kali dilakukan perekaman data pada tanggal 12-23 Oktober 2009. BKD selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada

KPE. Sudah ada 3 Surat Permohonan yang intinya mengajak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkerja sama dalam peng-aktifan Layanan Perbankan, yang pertama dari Bank Lampung tertanggal 18 November, Perihal Mohon Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja sama tentang KPE, kedua dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 5 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Payroll dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Ketiga dari Bank Nasional Indonesia (BNI) tertanggal 15 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi PNS. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 14 Januari 2010. Akan tetapi semenjak pergantian Walikota ke Bapak Herman H.N proses ini terhenti. BKD sudah melakukan telaah staf ke Walikota Bandar Lampung untuk segera melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 terkait fungsi KPE dan hasilnya BKD diperintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS tanpa adaya layanan perbankan dalam KPE.

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan Pihak ke-tiga?

Jawab : Pihak ke-3 menyambut dengan tangan terbuka apabila Pemerintah Kota Bandar Lampung ingin memfungsikan Layanan Perbankan KPE bahkan Bank Lampung, BNI dan BRI sudah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Layanan Perbankan KPE.

10. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Tiga kali.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Ya tentu saja yang selama ini KPE sebagai pengganti kartu identitas PNS (KARPEG). Walaupun masih banyak fungsi dari KPE yang belum maksimal tapi Pemerintah Kota Bandar Lampung masih optimis untuk memfungsikannya.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : Ya sebagai pengganti KARPEG sudah tercapai walaupun fungsi Layanan Perbankan dan Layanan kesehatan masih dalam usaha kesana.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Iya sudah cukup untuk mengimplementasikan KPE, lagi pula BKD hanya menyiapkan tempat dan undangan untuk pelaksanaan pemfotoan KPE, terkait dengan SDM, Staff BKD sudah cukup menguasai teknologi informasi (computer).

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Iya sudah cukup. Staff BKD sudah didukung lulusan S1 dan S2.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Terkait dengan alokasi sumber dana selama ini pemerintah menganggarkan melalui APBD kota Bandar Lampung yang dibebankan pada Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah tiap tahunnya.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya sudah, melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kepegawaian serta melalui surat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jadwal pemfotoan KPE dan melalui Loker Pelayanan Informasi KPE yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Tentu saja, melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian, selanjutnya melalui surat resmi yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung terkait jadwal pemfotoan dan melalui Loker Pelayanan di Bidang Kepegawaian.

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Rakor Kepegawaian, Surat Edaran dan Loker Pelayanan Informasi KPE.

7. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Secara teknis pihak rekanan yaitu PT. Sucofindo kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan protes dan complain dari PNS yang melakukan pemfotografan KPE.

8. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Dalam pelaksanaan pemfotografan KPE, kesiapan teknis (teknologi) disiapkan oleh rekanan BKN yaitu PT. Sucofindo, BKD hanya menyiapkan tempat/lokasi dan undangan pemfotografan bagi PNS.

9. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Iya tentu saja, sejak tahun 2011 BKD membuka loket khusus untuk memberikan informasi terkait Kartu Pegawai Elektronik (KPE) sehingga PNS bias dengan mudah memperoleh informasi.

10. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Iya, BKD menyediakan Loker Pelayanan Informasi KPE.

11. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?

Jawab : Iya, sudah banyak PNS yang memanfaatkannya misalnya saja menanyakan kapan jadwal foto KPE, selanjutnya juga ada yang menanyakan bagaimana apabila ada kesalahan penulisan Nama dan NIP dalam KPE.

12. Bagaimana *Political Will* Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Iya, sesuai dengan hasil telaah staff yang kami lakukan disposisi Bapak Walikota, KPE dibagikan dan digunakan hanya sebatas pengganti (Konversi) Kartu Pegawai ke KPE.

13. Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, berdasarkan hasil Perjalanan Dinas awal bulan ini, Kota Bandar Lampung segera melakukan pengambilan data atau foto ulang bagi PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE.

14. Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : selain rutin berkoordinasi dengan BKN terkait upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan KPE, kami pun selalui mengikuti dan

bertukar pikiran dengan beberapa daerah yang ada di provinsi Lampung seperti Kota Metro terkait pelaksanaan KPE.

15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Iya, PNS Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan konversi KPE sebagai Kartu Identitas pengganti KARPEG, walaupun sebagian besar masih sedikit bingung tentang fungsi dari KPE tersebut.